

ABSTRAK

Ekosistem karst adalah sebuah bentang alam yang memiliki keunikan yang khas dan memiliki sifat yang sangat rapuh. Keunikan dari ekosistem karst terletak pada melimpahnya air pada bawah permukaannya yang membentuk sungai bawah tanah, namun permukaan tanahnya tampak seperti kekeringan. Keberadaan karst tentu menjadi perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Madura terutama di Kabupaten Sumenep. Usaha pertambangan menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian daerah. Namun, pertambangan justru malah menjadi permasalahan serius di Kabupaten Sumenep. Lahan karst di Kabupaten Sumenep beralih fungsi menjadi lokasi pertambangan. Efek dari adanya kegiatan pertambangan ini mengakibatkan lahan karst longsor dan menimbulkan terbentuknya cekungan. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem karst terhadap kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem karst terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini adalah penelitian socio legal (*socio legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Analisa data dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sumenep memuat kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, intensitas pemanfaatan ruang dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Ketentuan peraturan zonasi tersebut menjadi acuan adanya pemisahan antara kawasan karst sebagai kawasan lindung geologi dan kawasan pertambangan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan peruntukannya. *Kedua*, upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem karst terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumenep adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berupa upaya pemulihan lahan eks tambang. Sejauh ini belum ada kebijakan preventif terkait perlindungan ekosistem karst. Terdapat hambatan-hambatan terkait penerapan kebijakan perlindungan ekosistem karst yakni belum adanya penetapan Kawasan Bentang Alam Karst dan tidak adanya kewenangan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membuat kebijakan perlindungan ekosistem karst.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pengelolaan Ekosistem Karst, Pertambangan, Kabupaten Sumenep.

ABSTRACT

Karst ecosystem is a landscape that is unique and has a very fragile nature. The uniqueness of the karst ecosystem lies in the abundance of water in the subsurface that forms underground rivers, but the land surface looks like a drought. The existence of karst is certainly a concern of the Central Government and Local Government in infrastructure development on Madura Island, especially in Sumenep Regency. The mining business is one of the supporting aspects of the regional economy. However, mining has become a serious problem in Sumenep district. Karst land in Sumenep Regency has been converted into a mining location. The effect of this mining activity has caused karst landslides and led to the formation of basins. The problems in this study include zoning regulations in controlling space utilization and local government efforts in managing karst ecosystems against mining activities. This study aims to determine and analyze zoning regulations in controlling space utilization and local government efforts in managing karst ecosystems against mining activities in Sumenep Regency.

This research is socio legal research, using the approach of legislation and facts. Data analysis in this research is descriptive qualitative.

The results of this study indicate that first, zoning regulations in controlling space utilization in Sumenep Regency contain activities that are allowed, activities that are allowed with conditions, the intensity of space utilization and activities that are not allowed. The provisions of the zoning regulations are a reference to the separation between karst areas as geological protected areas and mining areas as cultivation areas in accordance with their designation. Second, the local government's efforts in managing karst ecosystems against mining activities in Sumenep Regency are controlling pollution and environmental damage in the form of efforts to restore ex-mining land. So far there is no preventive policy related to the protection of karst ecosystems. There are obstacles related to the implementation of karst ecosystem protection policies, namely the absence of the determination of the Karst Landscape Area and the absence of the Sumenep Regency government's authority in making karst ecosystem protection policies.

Keywords: *Local Government, Karst Ecosystem Management, Mining, Sumenep Regency.*